

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pemberdayaan masyarakat

2.1.1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan¹ Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa

¹ Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut²:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

²Wisnu Indrajid. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Penerbit Intrans Publishing. Hal 15

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.1.3. Program Kerja Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Berdasarkan fungsi LPMK sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan dan kelompok usaha. yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kelompok maupun publik, strategi LPMK, dan pemberdayaan pembangunan. Maka dari itu dengan adanya program kelurahan ini dapat memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan kekuatan masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat kelurahan talng jawa mengalami perubahan sosial dalam peningkatan penghasilan karena keberhasilan program pemberdayaan masarakat kelurahan dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat. Ada beberapa indikator yang sangat penting dalam menjalankan strategi LPMK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Indikator fasilitator

Indikator fasilitator adalah untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan

masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).³

b. Indikator Mediator

Indikator Mediator adalah untuk mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan kelurahan terpadu semua elemen masyarakat.⁴

c. Indikator Motivator

Indikator Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak guna mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks ini motivator menempatkan dirinya sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan suatu Negara atau cita-cita bangsa Indonesia.⁵

d. Indikator Dinamisator

Indikator fasilitator adalah Indikator ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerepan program yang dipantau. Indikator ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi.⁶

³ Sutoro Eko, 2002. tentang indikator Fasilitator

⁴ S P Siagian, 1987:2. tentang indikator Mediator

⁵ Hawawi, Handari, 1988:110. tentang Motivator

⁶ Sutoro Eko, 2002. tentang indikator Dinamisator

2.1.4. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *stretaus* dengan kata jamak strategi, yang dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana – sarana yang dimiliki⁷.

Konsep strategi mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi itu merupakan suatu⁸:

- a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan – tujuan jangka panjangnya.
- b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c. Sudut menempatkan posisi yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- d. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi⁷. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi,

⁷ Iwan Purwanto. 2006. *Manajemen Strategi* . Bandung. Penerbit Yrama Widya. Hal 22

⁸ Heene, 2010. *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Rafika Aditama. Hal 53

pengembangan produk, penetrasi, pengetatan, divestasi, likuisdasi, dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar¹². Strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Strategi adalah kekuatan-kekuatan sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan persaingan. Berkaitan dengan memenangkan medan tempur persaingan dan mendapatkan kepemimpinan global, tujuan strategi secara tidak langsung berarti bentang sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti organisasi. Ketika dibangun dengan efektif, tujuan strategi dapat membuat orang melakukan hal-hal dengan cara-cara sebelumnya dianggap tidak mungkin⁹.

Penyusunan strategi ditentukan oleh misi yang komprehensif dan tegas, hati-hati dalam menilai lingkungan eksternal, serta keterbukaan organisasi dalam menyadari kekuatan dan kelemahannya. Semua ini berperan dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang di masa depan, serta membuat keputusan strategik yang mampu meminimumkan ancaman dan meningkatkan peluang organisasi yang bersangkutan. Misi yang komprehensif dan tegas akan memberikan kejelasan mengenai kemana organisasi berjalan untuk mencapai tujuan-tujuannya dimasa depan¹⁰.

⁹ Anoraga, Pandji. 2012. *Manajemen Bisnis*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 301

¹⁰ Hunger, J. David and Thomas L Whellen. 2010. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi Offset. hal 312

2.1.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Strategi

Kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu¹¹ :

a. Sistem informasi dari organisasi

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan juga *continue* yang mencakup ke seluruh bagian organisasi.

b. Kemampuan proses belajar dari organisasi

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipan harus memahami akan strategi ini, akan tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu mengimplementasikan strategi dengan sukses.

c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan akan sulit untuk mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil.

d. Struktur organisasi yang baku

Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur informasi, monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.

¹¹ Ibid. Hal 312

e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi tersebut kedalam realita.

f. Merangkal pengaruh politis di tubuh organisasi

Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan mempersepsikan sebuah strategi sebagai suatu yang meredusir kekuasaan dirinya atau statusnya, maka mereka akan menghambat upaya implementasi.

g. Kultur dari organisasi

Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif.

2.1.6. Tipe – Tipe Strategi

Ada beberapa tipe strategi, yang meliputi¹²

a. Strategi Organisasi (*corporate strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa dilakukan.

¹² Salusu J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo. Hal 112

b. Strategi Program (*program strategy*)

Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi),

c. Strategi Pendukung Sumber Daya (*resource support strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

d. Strategi Kelembagaan (*institutional strategy*)

Fokus dari strategi ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Sedangkan prinsip strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu :

- a. Strategi manajemen, yang meliputi strategi yang dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya: strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya.
- b. Strategi investasi, merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya: apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu definisi baru dan strategi disventasi, dan sebagainya.

- c. Strategi bisnis, yang sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya: strategi pemasaran distribusi, strategi produksi, strategi organisasi atau strategi operasional, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

2.1.7. Strategi Pemberdayaan

Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan perencanaan atau strategi yang baik untuk mencapai tujuan pemberdayaan yaitu memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metode, teknik, atau taktik.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:168) strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu: ¹³

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

¹³ Mardikanto dan Soebianto (2012:168) strategi pemberdayaan masyarakat

2.1.8. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini di perlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan adalah seluruh proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya¹⁴.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki¹⁵. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu

¹⁴ Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal. 58-59.

¹⁵ Mardikanto, Totok dan Puerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta. Hal. 52

mewujudkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan kemandirian masyarakat¹⁶.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang berifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di masa lalu. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi¹⁷.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong

¹⁶ Rauf, Rahyunir & Munaf, Yusri. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Indonesia. Zanafa Publishing, Yogyakarta. Hal. 78

¹⁷ Aprilia Theresia. Krishna dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta, Bandung. Hal.43.

memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini mengikuti langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat ada lapisan bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran diperdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberadaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah bertambah menjadi lemah, oleh karena itu kekurang berdayaan dalam mengahapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2.1.9. Pendekatan-Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dianggap perlu agar pemberdayaan itu sendiri menjadi tepat sasaran. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yang dapat disingkat 5P, yaitu¹⁸ :

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mencegah masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok

¹⁸ Mardikanto, Totok dan Puerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 79-80

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokong, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dubais dan Miley memberi beberapa titik atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu ¹⁹:

- a. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self - determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerja sama klien (*client partnership*).
- b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, memertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan menjaga kerahasiaan klien.

¹⁹ Mardikanto, Totok dan Puerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 81

- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerja sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

2.1.10. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu ²⁰:

1. Prinsip partisipasi, bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai tahap memetik hasil
2. Prinsip *sustainability*, mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat di lestarikan masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah sosial ekonomi setempat.
3. Prinsip demokratis, menghendaki agar rakyat dalam kegiatan pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada dalam hal untuk

²⁰ Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memeberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 61

menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

4. Prinsip transparansi, mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumber daya terutama keuangan harus dilakukan secara transparan (terbuka) agar semua pihak ikut memantau dan mengawasi penyaluran dan mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.
5. Prinsip akuntabilitas, mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksana secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Prinsip desentralisasi, dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Prinsip *profitable*, memberikan pendapat yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.
8. Prinsip *acceptable*, mengarahkan agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana serta pengelola.
9. Prinsip *replicable*, mengisyaratkan agar pengelola program pemberdayaan agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut beberapa prinsip sebagai berikut ²¹:

- a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*).
- b. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
- c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomi (*profitable*).
- d. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*)
- e. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulikan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

2.1.11. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, dalam pasal 12 menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
2. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

²¹ Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memeberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 62

3. Penumbuhkembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Peranan lembaga kemasyarakatan yang paling banyak dalam peranan membantu tugas lurah adalah lembaga RT, lembaga RW, LMPK, lembaga PKK kelurahan, lembaga karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, dikarenakan lembaga RT juga ditugaskan dengan tugas-tugas umum lainnya diberikan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Berikutnya dijelaskan dalam pasal 12, dalam melaksanakan tugasnya LPMD/LPMK mempunyai fungsi²² :

- a. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

²² Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

2.2. Tujuan Tentang Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pengertian Kesejahteraan

Secara etimologis, kesejahteraan dan sejahtera dapat diartikan sebagai berikut²³ :

- a. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia diman orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- b. Dalam istilah ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- c. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

²³ Kusuma, Fani Wirha. 2008. “ Peranan LSM Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”. Skripsi. Universitas Lampung. Hal 32

d. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Dibeberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja dan dikenal sebagai *workface*.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya²⁴. Definisi tersebut menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “*organized system*” yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya serta tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberiakan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 Ayat 1

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi²⁵ :

1. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
5. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

2.2.2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, ketrebukaan akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan²⁶.

²⁵ Ibid. Ayat 2

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 5

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi²⁷.

2.2.3. Indikator Pemberdayaan

Indikator Pemberdayaan Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, pemberdayaan menurut *Kieffer* mencakup tiga dimensi yaitu kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap usaha dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan²⁸

Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan

²⁷ Ibid. Pasal 3

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis* Hal 63

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan (power with). indikator pemberdayaan, meliputi.

a. Kebebasan mobilitas

Kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri

b. Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, gula, minyak goreng dan bumbu dapur); kebutuhan pribadi (sabun, sampo, bedak, parfum). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

c. Kemampuan membeli komoditas besar

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti TV, HP, lemari pakaian, kulkas. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian hewan ternak, memperoleh kredit usaha

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

f. Kesadaran hukum dan politik

Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes

Seorang dianggap berdaya, jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang megabaikan suami dan keluarga; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial.

h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

2.2.4. Indikator Keluarga Sejahtera

Menurut badan pusat statistic ada delapan indicator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, yaitu:

a Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sector formal maupun no formal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu.

b Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indicator social ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan prilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indicator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan

c Keadaan tempat tinggal

Adapun kreteria tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan, lantai dan luas lantai.

d Fasilitas tempat tinggal

Adapun fasilitas tempat tinggal yaitu yang dinilai terdiri dari 12 item, pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar, sumber air, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, WC dan jarak WC dari rumah.

e Kesehatan anggota keluarga

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, adapun pengertian kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekinomis.

f Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Kumudahan yang terdiri dari 6 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak took obat, penanganan obat-obatan, dan alat kontrasepsi.

g Kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan

Adapun kreteria kemudahan yang dmaksud terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak kesekolah, dan proses penerimaan.

h Kemudahan mendapat fasilitas trasnportasi

Adapun kemudahan mendapatkan transportasi yang dimaksud adalah terdiri dari 3 item yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.

2.3. Kerangka Pikir

Strategi LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarkat Kelurahan) sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan memiliki peranan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan sebagai mediator penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta mampu menggali potensi sumber-sumber

pembiayaan untuk mencapai kemandirian tanpa bergantung kepada pemerintah. Pemberdayaan masyarakat kelurahan terdapat juga beberapa indikator strategi yang mendukung kinerja lembaga pemberdayaan tersebut. Seperti fasilitator, mediator, motivator, dinamisator. Keempat indikator tersebut sangat mempengaruhi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Bagan 2.1

Kerangka pemikiran

